

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, kami telah dapat menyampaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2022-2026.

Adapun Renstra OPD ini akan diselaraskan dengan Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Materi Renstra ini mengandung Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan serta Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan berdasarkan kondisi masa kini dan kondisi yang diinginkan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Keterbatasan data pendukung merupakan hambatan utama dalam menyusun Renstra khususnya dalam menentukan prioritas kegiatan. Namun demikian dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah bertekad untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dituangkan ini.

Kami sangat berharap Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini dapat mendukung kegiatan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan. Saran masukan dan kritik yang bersifat membangun dari para stakeholders sangatlah kami harapkan guna kesempurnaan dalam Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2022-2026.

Putussibau, 16 September 2022

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

H.SUDARSO,S.Pd.,M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19700505 199110 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Pengembangan kabupaten tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Daerah, Masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan tersebut. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022-2026 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 2022-2026 agar dapat menyelaraskan arah dan kebijakan guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022-2026 mengacu pada penjabaran dari misi ke-4 Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 2022-2026 yaitu “*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas* ” Tata kelola pemerintahan berkaitan dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan

pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) serta sumber daya aparatur. Dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan Kapuas Hulu diharapkan dapat menciptakan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi dan memegang nilai-nilai teguh dasar serta memiliki daya saing dengan kabupaten lain di Indonesia.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Renstra SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 – 2026 adalah :

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 -2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2022-2026 dimaksudkan sebagai acuan arah kebijakan dan strategis pembangunan lima tahun kedepan dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas

Hulu (RPJMD) Tahun 2021 s/d 2026.

b. TUJUAN

Tujuan Penyusunan perencanaan strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Membangun akuntabilitas dan kinerja aparatur pemerintah dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu upaya penerapan prinsip – prinsip pemerintah yang baik.
2. Menjadikan dasar acuan Penyusunan Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan berdasarkan Buku Panduan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini dipaparkan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini dipaparkan

- 2.1. Tugas Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

-2.3.1 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

-2.3.2 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini dipaparkan

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan dan visi misi dan program Kepala daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Penentuan Isu-Isu strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN

Dalam Bab ini dipaparkan

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

-4.1.1. Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Bab ini dipaparkan

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

-5.1.1 Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam bab ini dipaparkan

- 6.1.1 Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1.1 Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas pokok dan fungsi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

a. Tugas Pokok

BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Fungsi Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka BKPSDM mempunyai fungsi sebagai berikut: Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan dukungan teknis di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2016, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai;
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
5. Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan Kepegawaian;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

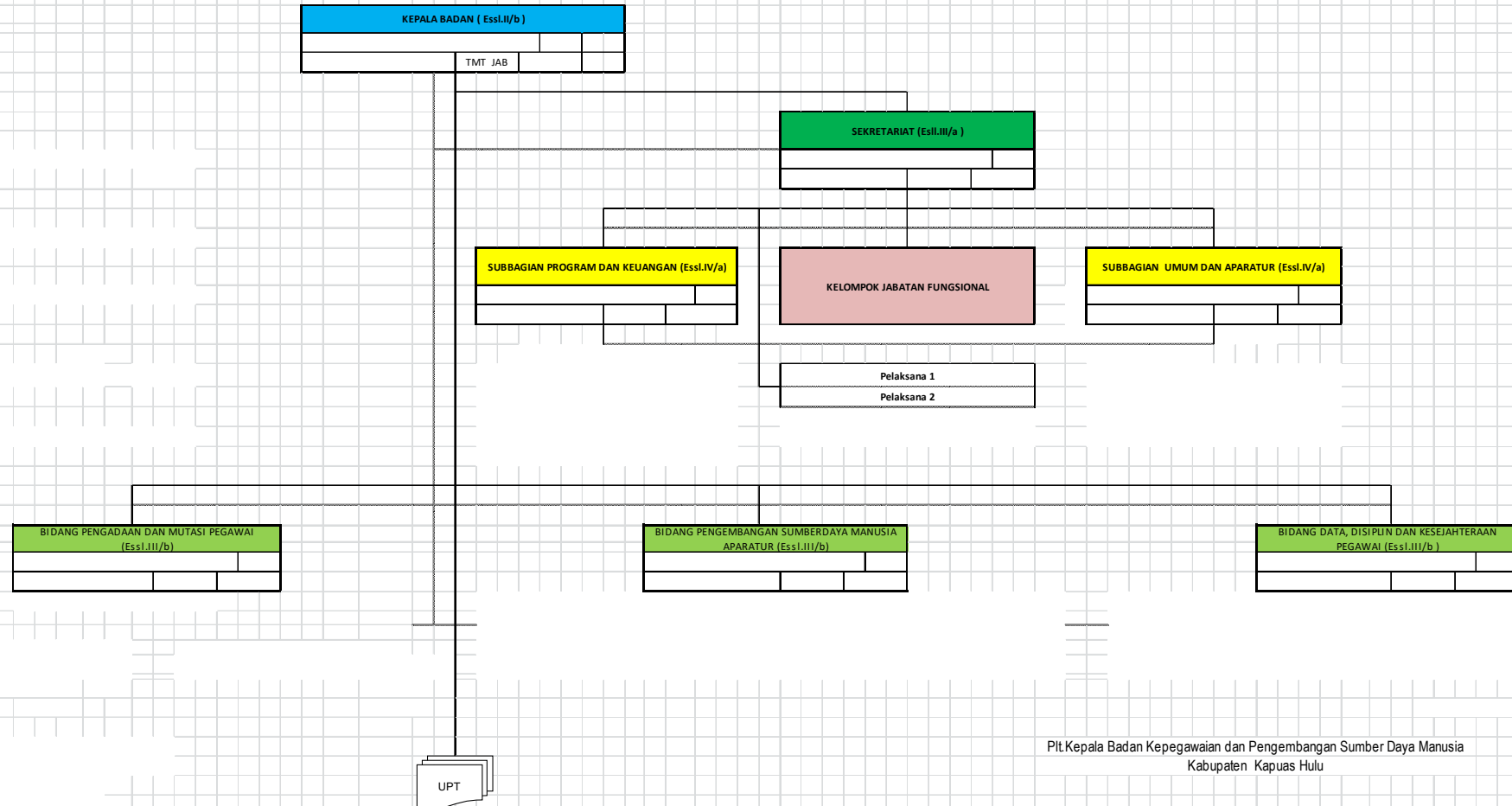
Untuk susunan dan Struktur Bagan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada gambar berikut ini :

RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2022-
2026

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 60 TAHUN 2021 TANGGAL 29 OKTOBER 2021

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU



Pt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu

H.SUDARSO,S.Pd.M.M.
NIP.197005051991101001



Kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tersebut diatas sebagaimana susunan menurut bidang dan bagian berikut ini:

1. Kepala Badan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kewenangan dibidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Badan melaksanakan fungsi:

- a. Penetapan rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan instansi lainnya;
- c. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di Bidang Kepegawaian Daerah, dan Pengembangan Sumber daya Manusia;
- d. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di Bidang Kepegawaian Daerah, dan Pengembangan Sumber daya Manusia;
- f. Pembangunan Reformasi Birokrasi pada Badan;
- g. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan.. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kegiatan Sekretariat;
- b. Pengkoordinasian sinkronisasi dan penyusunan rencana program kerja Badan;

- c. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, asset, kebersihan dan keamanan kantor;
- f. Penyelenggaraan tata usaha persuratan, kearsipan dan perpustakaan;
- g. Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat dan prosedur kerja;
- h. Pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Badan;
- i. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat dibantu oleh Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris. Adapun Sub Bagian tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Pengadaan dan Mutasi

Bidang Pengadaan dan Mutasi dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pengadaan dan mutasi pegawai. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pengadaan dan Mutasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai;
- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai;
- c. pengadaan dan mutasi pemindahan pegawai;
- d. pelayanan mutasi kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- e. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai;

- f. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai secara periodik;
- g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai secara periodik; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional

4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia aparatur. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- d. pelaksanaan pengembangan karier pegawai;
- e. pelaksanaan pembinaan kinerja pegawai;
- f. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur secara periodik;
- h. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur secara periodik; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional

5. Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai

Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai;
- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai;
- c. pengelolaan data dan dokumentasi pegawai;
- d. penegakan disiplin pegawai;
- e. peningkatan upaya kesejahteraan pegawai;
- f. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Data dan Informasi Kependudukan;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai secara periodik;
- h. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Data dan Informasi Kependudukan secara periodik; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional

6. Unit Pelaksana Teknis

Pada Badan dapat dibentuk UPT, dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia/aparatur, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kapuas Hulu Tahun 2021 di dukung oleh 48 orang pegawai, terdiri dari 37 orang pegawai Negeri Sipil dan 11 orang Pegawai Honorer/Kontrak. Secara jelas terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1.1

Komposisi Pegawai Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Eselonering, Tingkat Pendidikan dan Golongan Ruang

N O	ESELON/ NON ESELON	PENDIDIKAN						GOLONGAN			
		S2	S1	D3	SLT A	SL TP	S D	IV	III	II	I
1.	II										
2.	III	1	4		1			2	4		
3.	IV										
SUB JUMLAH		1	4		1						
4.	NON ESELON	2	12	4	13				22	9	
5.	HONORER		7		4						
JUMLAH		3	23	4	18			2	26	9	

2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dari segi sarana dan prasarana, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menempati ruangan kantor yang cukup memadai namun masih diperlukan ruangan khusus penyimpanan arsip dan ruangan pembinaan kepegawaian. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah memiliki sejumlah kendaraan dan peralatan kantor seperti komputer, laptop, printer dan sebagainya, namun seiring dengan bertambahnya volume pekerjaan maka dibutuhkan lebih banyak sarana-prasarana kantor. Sarana

dan prasarana yang tersedia di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Gedung Kantor

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu telah menempati gedung yang terletak di Jalan Danau Luar No 5. Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia yaitu :

- Kendaraan Roda Empat : 2 Buah
- Kendaraan Roda Dua : 24 Buah

SARANA PENDUKUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR LAINNYA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 SEBAGAI BERIKUT :

1. AC	: 45 buah
2. Lemari Es	: 1 Unit
3. Dispenser	: 2 Unit
4. Gorden	: 2 Unit
5. Alas Meja	: 9 Buah
6. Genset	: 1 Unit
7. Alat penghancur kertas	: 1 Unit
8. Rak Kayu	: 7 buah
9. Meja kerja Kayu	: 10 buah
10. Meja Rapat	: 8 Buah
11. Rak Kayu	: 7 Buah
12. Tempat Tidur kayu	: 20 buah
13. Lemari Pakaian	: 20 buah
14. Brankas	: 1 buah
15. Papan Visual/ Papan nama Kantor	: 3 buah

16. Tong air	: 2buah
17. Kursi tamu	: 5 Unit
18. Meja Kerja 1 Biro	: 9 Unit
19. Mesin Pemotong Rumput	: 1 Unit
20. Televisi	: 3 Unit
21. Microphone	: 5 Unit
22. Scanner	: 9 Unit
23. Kamera Digital	: 1 Unit
24. LCD Monitor	: 3 Unit
25. CCTV	: 5 Unit
26. Infocus	: 5 Unit
27. Handphone Encryption	: 2 Unit
28. Mainframe (Komputer Jaringan)	: 1 buah
29. PC Unit	: 10 Unit
30. Laptop	: 86 Unit
31. Notebook	: 18 Unit
32. UPS	: 5 Unit
33. Printer	: 22 Unit
34. Faximile	: 1 Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melihat tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya akan kami tampilkan pada tabel di bawah ini :

RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2022-
2026

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
1	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat akurasi penataan dokumen kepegawaian dalam bentuk Folder/ Scan Arsip																		
1	Jumlah Materi yang digunakan				2.000 materi 3.000	4.000 materi	4.000 materi	4.000 materi	4.000 materi	4.000 materi	4.000 materi	4.000 materi	4.000 materi	4.000 materi	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah jasa yang digunakan				1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah STNK yang dibayar				15 STNK	15 STNK	20 STNK	20 STNK	20 STNK	15 STNK	15 STNK	20 STNK	20 STNK	20 STNK	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah pengelolaan keuangan				18 penge lola keuan	18 penge lola keuan	18 penge lola keuan	18 penge lola keuan	18 penge lola keuan	18 penge lola keuan	18 penge lola keuan	18 penge lola keuan	18 penge lola keuan	18 penge lola keuan	100%	100%	100%	100%	100%

RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2022-
2026

				gan	gan	gan	gan	gan	gan	gan	gan	gan	gan	gan					
				2 jasa operat or	2 jasa operat or	2 jasa operat or	2 jasa operat or	2 jasa operat or	2 jasa operat or	2 jasa operat or	2 jasa operat or	2 jasa operat or	2 jasa operat or	2 jasa operat or	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah jasa kantor dan jenis peralatan/bahan pembersih			12 jenis perala tan keber sihan	12 jenis perala tan keber sihan	12 jenis perala tan keber sihan	12 jenis perala tan keber sihan	12 jenis perala tan keber sihan	12 jenis perala tan keber sihan	12 jenis perala tan keber sihan	12 jenis perala tan keber sihan	12 jenis perala tan keber sihan	12 jenis perala tan keber sihan	100%	100%	100%	100%	100%	
				10 jenis bahan pemb ersih	10 jenis bahan pemb ersih	10 jenis bahan pemb ersih	10 jenis bahan pemb ersih	10 jenis bahan pemb ersih	10 jenis bahan pemb ersih	10 jenis bahan pemb ersih	10 jenis bahan pemb ersih	10 jenis bahan pemb ersih	10 jenis bahan pemb ersih	10 jenis bahan pemb ersih	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah/jenis ATK yang digunakan			49 jenis ATK	49 jenis ATK	49 jenis ATK	49 jenis ATK	49 jenis ATK	49 jenis ATK	49 jenis ATK	49 jenis ATK	49 jenis ATK	49 jenis ATK	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Jumlah barang cetakan dan penggandaan			1 paket baran g cetaka n	1 paket baran g cetaka n	1 paket baran g cetaka n	1 paket baran g cetaka n	1 paket baran g cetaka n	1 paket baran g cetaka n	1 paket baran g cetaka n	1 paket baran g cetaka n	1 paket baran g cetaka n	1 paket baran g cetaka n	100%	100%	100%	100%	100%	
				25.50 0 lbr pengg andaa n	25.50 0 lbr pengg andaa n	25.50 0 lbr pengg andaa n	25.50 0 lbr pengg andaa n	25.50 0 lbr pengg andaa n	25.50 0 lbr pengg andaa n	25.50 0 lbr pengg andaa n	25.50 0 lbr pengg andaa n	25.50 0 lbr pengg andaa n	25.50 0 lbr pengg andaa n	25.50 0 lbr pengg andaa n	100%	100%	100%	100%	100%

RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2022-
2026

8	Jumlah gedung/kantor				2 paket gedung/kantor	2 paket gedung/kantor	2 paket gedung/kantor	2 paket gedung/kantor	2 paket gedung/kantor	2 paket gedung/kantor	2 paket gedung/kantor	2 paket gedung/kantor	2 paket gedung/kantor	2 paket gedung/kantor	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah/unit peralatan dan perlengkapan kantor				20 unit	36 unit	20 unit	36 unit	20 unit	20 unit	36 unit	20 unit	36 unit	20 unit	100%	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah tabung gas				24 tabung gas	24 tabung gas	24 tabung gas	24 tabung gas	24 tabung gas	24 tabung gas	24 tabung gas	24 tabung gas	24 tabung gas	24 tabung gas	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah eksemplar Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				5.592 eksemplar	5.592 eksemplar	5.592 eksemplar	5.592 eksemplar	5.592 eksemplar	5.592 eksemplar	5.592 eksemplar	5.592 eksemplar	5.592 eksemplar	5.592 eksemplar	100%	100%	100%	100%	100%
12	Jumlah Porsi Snack dan Porsi makan & minum Pegawai dan Tamu Kantor				10.560 porsi snack	9.834 porsi snack	10.560 porsi snack	10.560 porsi snack	10.560 porsi snack	10.560 porsi snack	9.834 porsi snack	10.560 porsi snack	10.560 porsi snack	10.560 porsi snack	100%	100%	100%	100%	100%
					480 porsi makan dan minum	462 porsi makan dan minum	480 porsi makan dan minum	480 porsi makan dan minum	480 porsi makan dan minum	480 porsi makan dan minum	462 porsi makan dan minum	480 porsi makan dan minum	480 porsi makan dan minum	480 porsi makan dan minum	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Jumlah buku RPK,DPA,DPA penyempurnaan dan DPPA BKPSDM Kab. Kapuas Hulu				111 cetak buku	111 cetak buku	111 cetak buku	111 cetak buku	111 cetak buku	111 cetak buku	111 cetak buku	111 cetak buku	111 cetak buku	111 cetak buku	100%	100%	100%	100%	100%

RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2022-
2026

16	Jumlah jasa pendukung kantor				7 orang	9 orang	11 orang	11 orang	11 orang	7 orang	9 orang	11 orang	11 orang	11 orang	100%	100%	100%	100%	100%
17	Persentase penataan dokumen kepegawaian dalam bentuk folder/scan arsip				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Jumlah media masa untuk keperluan publik				3 Jasa Iklan Media Massa	3 Jasa Iklan Media Massa	3 Jasa Iklan Media Massa	3 Jasa Iklan Media Massa	3 Jasa Iklan Media Massa	3 Jasa Iklan Media Massa	3 Jasa Iklan Media Massa	3 Jasa Iklan Media Massa	3 Jasa Iklan Media Massa	3 Jasa Iklan Media Massa	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Jumlah gedung/kantor (Rumah Jabatan)				-	1 paket	-	-	1 paket	-	1 paket	-	-	1 paket	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah gedung/kantor (Gedung Kantor)				-	-	1 paket	-	-	-	-	1 paket	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah kendaraan dinas kantor				12 kendaraan	12 kendaraan	15 kendaraan	15 kendaraan	15 kendaraan	12 kendaraan	12 kendaraan	15 kendaraan	15 kendaraan	15 kendaraan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah barang yang dipelihara				10 aset	7 barang aset	10 aset	10 aset	10 aset	10 aset	7 barang aset	10 aset	10 aset	10 aset	100%	100%	100%	100%	100%

RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2022-
2026

5	Jumlah gedung/kantor (Gedung Graha Abdi Praja)				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Bagi PNS BKPSDM				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Jumlah Penadaan Pakaian Dinas Hari Hari Tertentu				2 stel	-	50 stel PDH beserta perlengkapan	-	50 stel PDH beserta perlengkapan	2 stel	-	50 stel PDH beserta perlengkapan	-	50 stel PDH beserta perlengkapan	100%	100%	100%	100%	100%
							50 stel pakaian hitam putih		50 stel pakaian hitam putih			50 stel pakaian hitam putih		50 stel pakaian hitam putih					
2	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Hari Hari Tertentu Pegawai BKPSDM				49 stel	47 stel pakaian olahraga	50 Pakaian Lapangan	50 stel pakaian batik	50 stel pakaian olahraga	49 stel	47 stel pakaian olahraga	50 Pakaian Lapangan	50 stel pakaian batik	50 stel pakaian olahraga	100%	100%	100%	100%	100%
4	PersentasePenyelesaian capaian kinerja dan keuangan tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Jumlah dokumen Lakip				20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%

RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2022-
2026

2	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun				14 buku	14 buku	14 buku	14 buku	14 buku	14 buku	14 buku	14 buku	14 buku	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Dokumen/ Laporan Prognosis Realisasai anggaran				1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah dokumen/ Laporan administrasi realisasi asset				40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
5	jumlah Dokumen RKT, PKT, Laporan Renja dan Laporan RFK 0 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kapuas Hulu				30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelayanan administrasi mutasi, kenaikan pangkat dan seleksi penerimaan calon PNS																	
5	Tingkat akurasi data kepegawaian				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai																	
	Persentase pelaksanaan kegiatan pendampingan penyelenggaraan penerimaan IPDN																	

RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2022-
2026

1	Persentase pelaksanaan kegiatan penerimaan CPNS				1 paket	1 paket	1 paket	0 paket	0 paket	1 paket	1 paket	1 paket	0 paket	0 paket	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat akurasi jumlah record data kepegawaian				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase penyelesaian administrasi mutasi kenaikan pangkat PNS dan mutasi lainnya				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase penyelesaian pengurusan kartu pegawai elektronik, karpeg, kartu suami dan kartu istri				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah OPD yang datanya lengkap				53 OPD	53 OPD	53 OPD	53 OPD	53 OPD	53 OPD	53 OPD	53 OPD	53 OPD	53 OPD	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase pemberian satya lencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah kegiatan pendampingan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN				1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase penyelesaian administrasi pemberhentian, janda dan duda				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

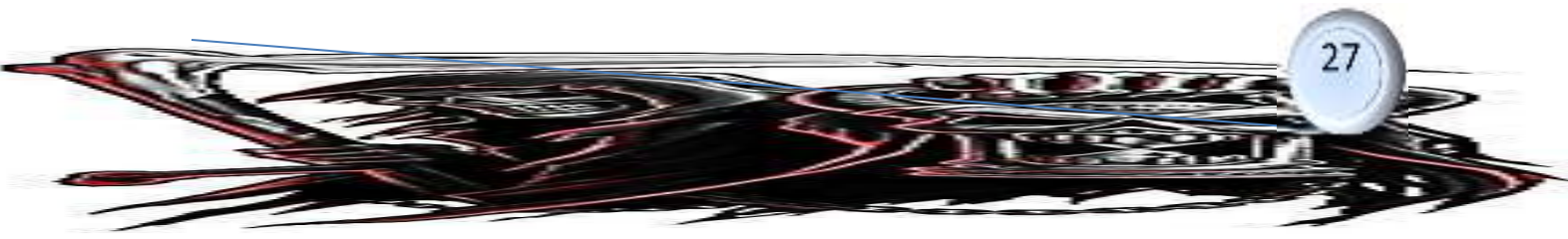
2022-
2026

9	Jumlah informasi data pegawai yang Akurat dan Aktual untuk perencanaan, pengembangan dan pengendalian PNS				-	550 PNS	120 PNS	125 PNS	130 PNS	-	550 PNS	120 PNS	125 PNS	130 PNS	0%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase penyelesaian administrasi mutasi pemindahan PNS				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase penyelesaian administrasi kecelakaan kerja dan jaminan kematian				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase penanganan kasus disiplin PNS				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase OPD yang bersih pelanggaran disiplin																		
1	Persentase penanganan kasus disiplin PNS				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase jumlah OPD yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan inspeksi disiplin PNS				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase penempatan jabatan sesuai dengan kualifikasi jabatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2022-
2026

Persentase penyusunan dan penilain kinerja PNS																			
1	Persentase pelantikan PNS sesuai kebutuhan pembinaan karier				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase penyelesaian penilaian kinerja PNS				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	100%	0%
8	Persentase PNS yang memiliki sertifikat kepemimpinan																		
	Persentase PNS yang memiliki sertifikat Kompetensi dasar				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tugas teknis dan fungsi																		
	Persentase Aparatur BKPSDM yang mengikuti Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis																		



RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2022-
2026

1	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNSD				40 orang	47 orang	0 orang	51 orang	37 orang	40 orang	47 orang	0 orang	51 orang	37 orang	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Tugas Teknis dan Fungsi				135 orang	12 orang	95 orang	95 orang	95 orang	135 orang	12 orang	95 orang	95 orang	95 orang	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis				27 orang	29 orang	35 orang	35 orang	35 orang	27 orang	29 orang	35 orang	35 orang	35 orang	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase PNS yang mengikuti tugas belajar				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Jumlah PNS yang menerima bantuan tugas belajar				11 orang	20 orang	1 orang	4 orang	0 orang	11 orang	20 orang	1 orang	4 orang	0 orang	100%	100%	100%	100%	100%

RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2022-
2026

Tabel 2.3.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.390.542.200	1.814.679.600	1.724.684.950	2.084.769.500	995.915.370	2.338.866.315	1.780.340.886	1.690.746.925	2.038.533.268	986.805.549	-16 %	-16%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	321.060.000	247.465.000	281.337.000	242.525.934	83.218.000	321.032.000	247.453.000	269.123.230	242.214.374	83.172.256	-24 %	- 24 %
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	78.500.000	20.900.000	18.800.000	-	-	78.500.000	20.900.000	18.800.000	-	--	-38 %	-38 %
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.562.578.800	1.648.469.100	1.837.702.850	159.995.150	-	2.402.842.400	1.577.217.825	1.729.563.496	142.912.187	-	- 100 %	- 100 %
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	88.275.500	73.274.896	54.628.500	100.673.850	42.205.500	88.121.000	73.242.100	54.628.500	100.673.350	42.205.200	- 14 %	- 14 %
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	5.092.043.500	4.064.777.304	4.202.176.700	8.805.828.628	3.324.809.900	4.831.530.667	4.018.469.799	4.098.763.179	8.558.638.124	3.300.681.551	- 8 %	- 7 %

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk melihat tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya akan kami tampilkan di bawah ini :

Dalam menjalankan tupoksi kepegawaian, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menghadapi sejumlah tantangan, yaitu:

1. Tuntutan terhadap pelayanan publik yang dinamis, harus ditunjang dengan kondisi aparatur yang berkompeten dan profesional sesuai dengan perkembangan zaman saat ini;
2. Keinginan masyarakat agar pelayanan dapat dilakukan secara optimal yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas pelayanan prima dari kinerja organisasi;
3. Kondisi masyarakat yang sangat dimanis di era globalisasi yang telah memasuki masa Revolusi Industri 4.0, perlu upaya pengintegrasian produk-produk pelayanan ke dalam sistem teknologi dan informasi sehingga lebih cepat dan tepat serta memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi;
4. Paradigma pola pikir ASN yang sebagian besar belum bergeser secara serempak menuju paradigma aparatur pelayanan publik.
5. Penerimaan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK).

BAB III

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

**3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA**

Permasalahan pelayanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:

1. Belum terbukanya akses secara luas bagi setiap ASN untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi serta tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, akurat dan akuntabel;
2. Terbatasnya jumlah ASN yang memenuhi standar kompetensi sesuai dengan syarat suatu jabatan;
3. Perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai wadah bagi ASN dalam meningkatkan kualifikasi jenjang pendidikan masih sangat terbatas, sehingga bermuara kepada tingkat kualitas pelayanan kepada masyarakat relatif rendah.
4. Minimnya jumlah formasi/kuota yang didapat dalam penerimaan CPNS yang disetujui / diberikan oleh Pemertintah Pusat.

**3.2. TELAHAAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TERPILIH**

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan penjabaran dari program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026, dimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terlibat langsung dan aktif dalam mewujudkan pernyataan misi Keempat yaitu: **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan tersedianya infrastruktur yang berbasis transparansi,responsibilitas dan akuntanbilitas”**.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu terpilih yaitu seperti dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 yaitu: **“TERWUJUDNYA**

KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL”.

Visi tersebut mengandung lima elemen utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, EnergiK, Berdaya saing, Amanah, dan Terampil sebagaimana dijabarkan pada penjelasan di bawah ini:

1. Harmonis: mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
2. EnergiK: mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
3. Berdaya saing: mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, , kompetitif, serta berwawasan ke depan.
4. Amanah: mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Terampil: mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Sedangkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu yaitu adalah

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan.;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi

3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat

Telaahan terhadap visi dan misi program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih memberikan gambaran tentang peran serta dan keterlibatan langsung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas, dalam (misi pertama RPJM Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2025).

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

visi BKN Tahun 2020-2024: adalah melaksanakan Visi Presiden Nomor 8 (delapan) yaitu “pengelolaan Pemerintahan yang Bersih Efektif, dan Terpercaya” dengan melaksanakan arahan presiden nomor 4 (empat) yaitu “Penyederhanaan Birokrasi” dan Agenda pembangunan nomor 7 (tujuh) yaitu “Memperkuat stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan ”*Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*”.

Profesional artinya, (a) pengelola ASN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil yang memiliki integritas, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat, (b) pengelola ASN memiliki kapabilitas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

Berintegritas itu ada dua dimensi arti, yaitu 1) berintegritas yang berarti dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya, pengelola ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2) pengelola ASN itu terpercaya yang berarti pengelola ASN dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

Visi pembangunan daerah Provinsi Kalbar yang telah disusun dan ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”

Berdasarkan pernyataan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tersebut, terlihat adanya keterkaitan erat antara tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh BKD Provinsi Kalbar dengan Visi yang ditetapkan, terutama pada bagian “Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”.

Sedangkan misi yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar untuk periode tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur

Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif

Misi 4 : Mewujudkan masyarakat sejahtera *Rencana Strategis Perubahan 2018-2023 BKD Prov.Kalbar*

Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang tertib

Misi 6 : Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

Terkait dengan penjabaran misi diatas, terdapat 1 (satu) misi yang memiliki keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BKD Provinsi Kalbar, yaitu pada misi kedua :

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance”.

Terkait dengan penjelasan sebelumnya, bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*, dibutuhkan dukungan dalam bentuk ketersediaan sumber daya manusia pemerintahan daerah yang kompeten.

Strategi dalam renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu 2022-2026, adalah berupa upaya-upaya yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk itu langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1. Mendorong setiap PNS untuk melakukan pengembangan kompetensi sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 j.o Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 untuk dapat memenuhi hak pengembangan kompetensi sebanyak minimal 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) per tahun secara terintegrasi melalui bentuk pelatihan klasikal dan nonklasikal;
2. Menciptakan *kondisi antara* untuk menjembatani tercapainya tujuan terwujudnya kondisi manajemen kepegawaian di masa yang akan datang. Adapun kondisi antara sebagai tersebut adalah sebagai berikut :
 - Berbagai upaya pengembangan manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi pada saat ini, yang diaktualisasikan melalui penyusunan rencana kegiatan program berjangka menengah diarahkan pada pencapaian visi.
 - Penyempurnaan berbagai manajemen kepegawaian melalui kegiatan tindak lanjut berbagai peraturan perundang-undangan kepegawaian mengacu perkembangan norma, standar, dan prosedur kepegawaian secara nasional yang disusun dalam berbagai rancangan manajemen kepegawaian (Perda,

Peraturan Bupati dll) yang baru sebagai antisipasi kebutuhan pembinaan PNS berbasis kompetensi di masa yang akan datang.

3. Menyelenggarakan *capacity building* kelembagaan untuk mewujudkan keberdayaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar mampu menghadapi tantangan perubahan dan perkembangan dalam menyelenggarakan kompetensi intinya. Untuk itu perlu ditempuh :
 - Memperkuat integrasi internal melalui pencapaian komitmen bersama semua pimpinan dan staf.
 - Menyelaraskan kompetensi individu pegawai dengan kompetensi inti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (*competence-based*), melalui: penciptaan kondisi dan pembinaan kapasitas SDM pegawai yang mendorong peningkatan motivasi kerja, kualitas SDM pegawai (keahlian, pengetahuan, wawasan dan keterampilan), serta tumbuhnya daya kreasi dan inovasi, dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.
 - Menanamkan nilai-nilai organisasi (budaya kerja/etos kerja, akuntabilitas kinerja, disiplin), baik melalui pembinaan langsung atasan-pegawai, maupun melalui media kepelatihan.

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Adapun beberapa isu strategis dibidang Kepegawaian di daerah yang merupakan isu strategis Nasional adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan data pegawai yang berbasis digital dan belum optimalnya pemanfaatan informasi kepegawaian yang berbasis elektronik.
2. Belum optimalnya implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang kode etik PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
3. Belum optimalnya pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi dan teladan serta pemberian gelar tanda kehormatan ASN yang sudah memenuhi syarat masa kerja tertentu.
4. Belum optimalnya implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;
5. Belum optimalnya layanan administrasi kepegawaian yang efektif, efisien, transparan, responsif dan akuntabel;
6. Belum terbukanya akses secara luas bagi setiap ASN untuk meningkatkan dan

mengembangkan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi serta tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, akurat dan akuntabel;

7. Terbatasnya jumlah ASN yang memenuhi standar kompetensi sesuai dengan syarat jabatan Perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai wadah bagi ASN dalam meningkatkan kualifikasi jenjang pendidikan masih sangat terbatas, sehingga bermuara kepada tingkat kualitas pelayanan kepada masyarakat yang rendah.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi BKPSDM	B	B	B	B	B
		1. Meningkatnya implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Reformasi Birokrasi	25,10	25,10	30,10	30,10	35,10
			2. Predikat SAKIP	A	A	A	A	AA
2	Meningkatkan komponen indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negeri		1. Persentase Peningkatan Komponen Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	77,85	79,90	80,16	80,4	80,67
		1. Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	1. Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi Pendidikan	46,45%	46,46%	46,47%	46,48%	46,49%

	2. Meningkatnya Disiplin ASN	2. Persentase disiplin ASN	99,90%	99,80%	99,80%	99,80 %	99,80%
	3. Meningkatnya Kapasitas Kinerja ASN	2. Persentase Kapasitas Kinerja ASN	71,70%	80,00%	81,00%	82,00 %	83,00%
	4. Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	92,2	92,5	93	94	95
	4. Meningkatnya Kompetensi ASN	5. Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi	93,33%	93,34%	93,35%	93,36 %	93,37%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistic, rasional dan komprehensif, maka strategi yang akan ditempuh oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien adalah :

Meningkatkan Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis Sistem Merit.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan – ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Untuk menunjang terlaksananya strategi tersebut, ditetapkan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Kompetensi ASN;**
- 2. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan ASN;**
- 3. Peningkatan Disiplin ASN;**
- 4. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN; dan**
- 5. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian.**

Adapun dari analisa lingkungan strategis, maka dapat ditetapkan strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi	:	Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, Dan Terampil		
Misi 4	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		1.1 Meningkatkan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1 Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Pada Perangkat Daerah	1.1.1.1 Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatkan komponen indeks Profesionalitas ASN		2.1 Meningkatkan Kualifikasi ASN	2.2.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis Sistem Merit.	2.2.2.1 Peningkatan Kualifikasi Pendidikan ASN;
		2.2. Meningkatkan Disiplin ASN		2.2.2.2 Peningkatan Disiplin ASN;
		2.3 Meningkatkan Kapasitas Kinerja ASN		2.2.2.3 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN;
		2.4. Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian		2.2.2.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian.
		2.5 Meningkatkan Kompetensi ASN		2.2.2.5 Peningkatan Kompetensi ASN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengacu kepada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengemban amanat untuk menyukseskan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2025.

Untuk itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merencanakan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2022-
2026

Tabel. 6.1.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu

[j]	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi BKPSDM				CC	B		B		B		B		B		BB		BKPSDM	KAPUAS HULU
	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi					25,10		25,10		30,10		30,10		35,10		35,10			
		Predikat SAKIP BKPSDM daerah				BB	A		A		A		A		AA		AA		BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat SAKIP BKPSDM dari Inkab	BB	A	Rp 56,172,580.00	A	Rp 57,019,838.00	A	Rp 58,019,838.00	A	Rp 59,519,838.00	A	Rp 61,519,838.00	A	Rp 292,251,932.00	Sekretaris	
					Tingkat realisasi keuangan	80%	100%	Rp 4,459,018,872.00	100%	Rp 4,568,018,872.00	100%	Rp 4,677,018,872.00	100%	Rp 4,786,018,872.00	100%	Rp 4,895,018,872.00	100%	Rp 23,385,094,360.00		
					Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	100%	100%	Rp 66,000,000.00	100%	Rp 26,000,000.00	100%	Rp 26,000,000.00	100%	Rp 26,000,000.00	100%	Rp 26,000,000.00	100%	Rp 170,000,000.00		
					Persentase pemenuhan data kepegawaian	100%	100%	Rp 364,000,000.00	100%	Rp 240,000,000.00	100%	Rp 422,000,000.00	100%	Rp 288,000,000.00	100%	Rp 490,000,000.00	100%	Rp 1,804,000,000.00		
					Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	90,16	90,20	Rp 1,003,400,000.00	90,24	Rp 999,400,000.00	90,28	Rp 1,061,000,000.00	90,32	Rp 1,128,760,000.00	90,36	Rp 1,203,296,000.00	90,36	Rp 5,395,856,000.00		
					Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	100%	Rp 275,000,000.00	100%	Rp 130,000,000.00	100%	Rp 510,000,000.00	100%	Rp 410,000,000.00	100%	Rp 10,000,000.00	100%	Rp 1,335,000,000.00		
					Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100%	100%	Rp 811,896,000.00	100%	Rp 882,744,000.00	100%	Rp 953,592,000.00	100%	Rp 1,024,440,000.00	100%	Rp 1,095,288,000.00	100%	Rp 4,767,960,000.00		
					Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	100%	100%	Rp 177,100,000.00	100%	Rp 117,100,000.00	100%	Rp 183,100,000.00	100%	Rp 117,100,000.00	100%	Rp 189,100,000.00	100%	Rp 783,500,000.00		
			5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 56,172,580.00	100%	Rp 57,019,838.00	100%	Rp 58,019,838.00	100%	Rp 59,519,838.00	100%	Rp 61,519,838.00	100%	Rp 292,251,932.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENSTRA, RENJA, RKT, PKT, IKU)	12 Dokumen	4 Dokumen	Rp 6,300,000.00	4 Dokumen	Rp 6,400,000.00	4 Dokumen	Rp 6,500,000.00	4 Dokumen	Rp 6,700,000.00	4 Dokumen	Rp 7,000,000.00	4 Dokumen	Rp 32,900,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	15 Dokuemn	2 Dokumen	Rp 7,000,000.00	2 Dokumen	Rp 7,219,838.00	2 Dokumen	Rp 7,319,838.00	2 Dokumen	Rp 7,519,838.00	2 Dokumen	Rp 7,819,838.00	2 Dokumen	Rp 36,879,352.00	BKPSDM	KAPUAS HULU

RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2022-
2026

			5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	Rp 4,000,000.00	2 Dokumen	Rp 4,000,000.00	2 Dokumen	Rp 4,100,000.00	2 Dokumen	Rp 4,300,000.00	2 Dokumen	Rp 4,500,000.00	2 Dokumen	Rp 20,900,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	26 Dokumen	2 Dokumen	Rp 7,372,580.00	2 Dokumen	Rp 7,400,000.00	2 Dokumen	Rp 7,400,000.00	2 Dokumen	Rp 7,600,000.00	2 Dokumen	Rp 8,000,000.00	2 Dokumen	Rp 37,772,580.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	Rp 4,000,000.00	2 Dokumen	Rp 4,000,000.00	2 Dokumen	Rp 4,200,000.00	2 Dokumen	Rp 4,400,000.00	2 Dokumen	Rp 4,700,000.00	2 Dokumen	Rp 21,300,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan Kinerja (LKJ) (Triwulan)	24 Dokumen	4 Laporan	Rp 7,500,000.00	4 Laporan	Rp 8,000,000.00	4 Laporan	Rp 8,500,000.00	4 Laporan	Rp 9,000,000.00	4 Laporan	Rp 9,500,000.00	4 Laporan	Rp 42,500,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKJip, LPD, dan RB)		3 Laporan	Rp 20,000,000.00	3 Laporan	Rp 20,000,000.00	3 Laporan	Rp 20,000,000.00	3 Laporan	Rp 20,000,000.00	3 Laporan	Rp 20,000,000.00	3 Laporan	Rp 100,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 4,459,018,872.00	100%	Rp 4,568,018,872.00	100%	Rp 4,677,018,872.00	100%	Rp 4,786,018,872.00	100%	Rp 4,895,018,872.00	100%	Rp 23,385,094,360.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan		38 Orang/Bulan	Rp 4,147,018,872.00	38 Orang/Bulan	Rp 4,247,018,872.00	38 Orang/Bulan	Rp 4,347,018,872.00	38 Orang/Bulan	Rp 4,447,018,872.00	38 Orang/Bulan	Rp 4,547,018,872.00	38 Orang/Bulan	Rp 21,735,094,360.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	penyediaan jasa Penatusahaan dan verifikasi Keuangan	100%	12 Dokumen	Rp 270,000,000.00	12 Dokumen	Rp 275,000,000.00	12 Dokumen	Rp 280,000,000.00	12 Dokumen	Rp 285,000,000.00	12 Dokumen	Rp 290,000,000.00	12 Dokumen	Rp 1,400,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		2 Dokumen	Rp 10,000,000.00	1 Dokumen	Rp 12,000,000.00	1 Dokumen	Rp 14,000,000.00	1 Dokumen	Rp 16,000,000.00	1 Dokumen	Rp 18,000,000.00	1 Dokumen	Rp 70,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	2 Laporan	Rp 7,000,000.00	2 Laporan	Rp 7,500,000.00	2 Laporan	Rp 8,000,000.00	2 Laporan	Rp 8,500,000.00	2 Laporan	Rp 9,000,000.00	2 Laporan	Rp 40,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		2 Laporan	Rp 10,000,000.00	2 Laporan	Rp 10,500,000.00	2 Laporan	Rp 11,000,000.00	2 Laporan	Rp 11,500,000.00	2 Laporan	Rp 12,000,000.00	2 Laporan	Rp 55,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Sempsteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Sempsteran SKPD (RPK-0)		18 Laporan	Rp 9,000,000.00	18 Laporan	Rp 9,500,000.00	18 Laporan	Rp 10,000,000.00	18 Laporan	Rp 10,500,000.00	18 Laporan	Rp 11,000,000.00	18 Laporan	Rp 50,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2 Dokumen	Rp 6,000,000.00	2 Dokumen	Rp 6,500,000.00	2 Dokumen	Rp 7,000,000.00	2 Dokumen	Rp 7,500,000.00	2 Dokumen	Rp 8,000,000.00	2 Dokumen	Rp 35,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 66,000,000.00	100%	Rp 26,000,000.00	100%	Rp 26,000,000.00	100%	Rp 26,000,000.00	100%	Rp 26,000,000.00	100%	Rp 170,000,000.00	Kasubag Umum aparat	KAPUAS HULU

RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2022-
2026

			5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	Rp 3,000,000.00	1 Dokumen	Rp 3,000,000.00	1 Dokumen	Rp 3,000,000.00	1 Dokumen	Rp 3,000,000.00	1 Dokumen	Rp 15,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU	
			5.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	Rp 50,000,000.00	1 Dokumen	Rp 10,000,000.00	1 Dokumen	Rp 10,000,000.00	1 Dokumen	Rp 10,000,000.00	1 Dokumen	Rp 90,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU	
			5.03.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		2 Laporan	Rp 5,000,000.00	2 Laporan	Rp 5,000,000.00	2 Laporan	Rp 5,000,000.00	2 Laporan	Rp 5,000,000.00	2 Laporan	Rp 25,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU	
			5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	Rp 4,000,000.00	2 Laporan	Rp 4,000,000.00	2 Laporan	Rp 4,000,000.00	2 Laporan	Rp 4,000,000.00	2 Laporan	Rp 20,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU	
			5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	Rp 4,000,000.00	1 Laporan	Rp 4,000,000.00	1 Laporan	Rp 4,000,000.00	1 Laporan	Rp 4,000,000.00	1 Laporan	Rp 20,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU	
			5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	Rp 364,000,000.00	100% 1 Paket	Rp 240,000,000.00	100% 1 Paket	Rp 422,000,000.00	100% 1 Paket	Rp 288,000,000.00	100% 1 Paket	Rp 490,000,000.00	Rp 1,804,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1 Paket	Rp 5,000,000.00	100% 1 Paket	Rp 7,000,000.00	100% 1 Paket	Rp 5,000,000.00	100% 1 Paket	Rp 7,000,000.00	100% 1 Paket	Rp 5,000,000.00	Rp 29,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	Rp 150,000,000.00	1 Paket		1 Paket	Rp 160,000,000.00	1 Paket		1 Paket	Rp 180,000,000.00	Rp 490,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		2 Dokumen	Rp 5,000,000.00	2 Dokumen	Rp 5,000,000.00	2 Dokumen	Rp 5,000,000.00	2 Dokumen	Rp 5,000,000.00	2 Dokumen	Rp 5,000,000.00	Rp 25,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20 Orang	Rp 204,000,000.00	20 Orang 100%	Rp 228,000,000.00	20 Orang 100%	Rp 252,000,000.00	20 Orang	Rp 276,000,000.00	20 Orang	Rp 300,000,000.00	Rp 1,260,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 1,003,400,000.00	100%	Rp 999,400,000.00	100%	Rp 1,061,000,000.00	100%	Rp 1,128,760,000.00	100%	Rp 1,203,296,000.00	Rp 5,395,856,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	1 Paket	Rp 30,000,000.00	1 Paket	Rp 30,000,000.00	1 Paket	Rp 30,000,000.00	1 Paket	Rp 30,000,000.00	1 Paket	Rp 30,000,000.00	Rp 150,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
									3 Paket										

RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2022-
2026

			5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia			Rp 210,000,000.00		Rp 1,144,799,100.00			Rp 1,144,799,100.00		Rp 1,144,799,100.00		Rp 1,144,799,100.00	BKPSDM	KAPUAS HULU	
			5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	1 Paket	Rp 15,000,000.00	1 Paket	Rp 98,952,250.00	1 Paket	Rp 98,952,250.00	1 Paket	Rp 98,952,250.00	1 Paket	Rp 98,952,250.00	1 Paket	Rp 98,952,250.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	1 Paket	Rp 30,000,000.00	1 Paket	Rp 30,000,000.00	1 Paket	Rp 30,000,000.00	1 Paket	Rp 30,000,000.00	1 Paket	Rp 30,000,000.00	1 Paket	Rp 150,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	12 Dokumen	Rp 5,000,000.00	12 Dokumen	Rp 5,000,000.00	12 Dokumen	Rp 5,000,000.00	12 Dokumen	Rp 5,000,000.00	12 Dokumen	Rp 5,000,000.00	12 Dokumen	Rp 25,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%		Rp 30,000,000.00	4 laporan	Rp 30,000,000.00	4 laporan	Rp 30,000,000.00	4 laporan	Rp 30,000,000.00	4 laporan	Rp 30,000,000.00	4 laporan	Rp 150,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	12 Laporan	Rp 560,000,000.00	12 Laporan	Rp 616,000,000.00	12 Laporan	Rp 677,600,000.00	12 Laporan	Rp 745,360,000.00	12 Laporan	Rp 819,896,000.00	12 Laporan	Rp 3,418,856,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	4 Laporan	Rp 8,400,000.00	4 Laporan	Rp 8,400,000.00	4 Laporan	Rp 8,400,000.00	4 Laporan	Rp 8,400,000.00	4 Laporan	Rp 8,400,000.00	4 Laporan	Rp 42,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	5 Dokumen	Rp 115,000,000.00	5 Dokumen	Rp 115,000,000.00	5 Dokumen	Rp 115,000,000.00	5 Dokumen	Rp 115,000,000.00	5 Dokumen	Rp 115,000,000.00	5 Dokumen	Rp 575,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		Rp 275,000,000.00	100%	Rp 130,000,000.00	100%	Rp 510,000,000.00	100%	Rp 410,000,000.00	100%	Rp 10,000,000.00	100%	Rp 1,335,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit Mobil	Rp 840,000,000.00			1 Unit (Mobil)	Rp 400,000,000.00				Rp 400,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		4 Unit (Sepeda Motor)	Rp 120,000,000.00	4 Unit (Sepeda Motor)	Rp 120,000,000.00	1 Unit (Mobil)	Rp 500,000,000.00						Rp 740,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Rp 5,000,000.00	2 Meja dan 2 Kursi	Rp 10,000,000.00	2 Meja dan 2 Kursi	Rp 10,000,000.00	2 Meja dan 2 Kursi	Rp 10,000,000.00	2 Meja dan 2 Kursi	Rp 10,000,000.00	2 Meja dan 2 Kursi	Rp 45,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit (Genset)	Rp 150,000,000.00										Rp 150,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Rp 811,896,000.00	100%	Rp 882,744,000.00	100%	Rp 953,592,000.00	100%	Rp 1,024,440,000.00	100%	Rp 1,095,288,000.00	100%	Rp 4,767,960,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU

RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2022-
2026

			5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	430 Materai	12 Laporan	Rp 8,000,000.00	12 Laporan	Rp 8,000,000.00	12 Laporan	Rp 8,000,000.00	12 Laporan	Rp 8,000,000.00	12 Laporan	Rp 40,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU		
			5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	12 Laporan	Rp 115,000,000.00	12 Laporan	Rp 115,000,000.00	12 Laporan	Rp 115,000,000.00	12 Laporan	Rp 115,000,000.00	12 Laporan	Rp 575,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU		
			5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Tenaga Kontrak Makan Minum aktivitas lapangan Pegawai	9 orang 7420 Porsi	15 Orang 14256 Porsi	Rp 688,896,000.00	17 Orang 14784	Rp 759,744,000.00	19 Orang 15312	Rp 830,592,000.00	21 Orang 15840	Rp 901,440,000.00	23 Orang 16368	Rp 972,288,000.00	23 Orang 16368	Rp 4,152,960,000.00	BKPSDM BKPSDM	KAPUAS HULU KAPUAS HULU
			5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Rp 177,100,000.00	100%	Rp 117,100,000.00	100%	Rp 183,100,000.00	100%	Rp 117,100,000.00	100%	Rp 189,100,000.00	100%	Rp 783,500,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit Mobil dinas yang terpelihara	1 Unit	Rp 45,870,000.00	1 Unit	Rp 45,870,000.00	1 Unit	Rp 45,870,000.00	1 Unit	Rp 45,870,000.00	1 Unit	Rp 45,870,000.00	1 Unit	Rp 229,350,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit Mobil dinas operasional yang terpelihara	1 Unit	Rp 21,230,000.00	1 Unit	Rp 21,230,000.00	1 Unit	Rp 21,230,000.00	1 Unit	Rp 21,230,000.00	1 Unit	Rp 21,230,000.00	1 Unit	Rp 106,150,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		40 Unit	Rp 50,000,000.00	40 Unit	Rp 50,000,000.00	40 Unit	Rp 50,000,000.00	40 Unit	Rp 50,000,000.00	40 Unit	Rp 50,000,000.00	40 Unit	Rp 250,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi			Rp 60,000,000.00			1 unit	Rp 66,000,000.00			1 unit	Rp 72,000,000.00	1 unit	Rp 198,000,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
Meningkatkan Komponen Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara		Persentase Peningkatan Komponen Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara				80.75%	77.85%	Rp 16,774,696,400.00	79.90%	Rp 14,291,679,505.00	80.16%	Rp 15,264,752,196.50	80.41%	Rp 13,658,069,280.05	80.67%	Rp 14,691,281,870.66	80.67%	Rp 14,691,281,870.66	BKPSDM	KAPUAS HULU
Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi Pendidikan					46.44%	46.45%	Rp 1,785,477,400.00	46.46%	Rp 1,802,513,825.00	46.47%	Rp 1,866,935,700.00	46.48%	Rp 1,862,752,900.00	46.49%	Rp 1,988,428,652.50	46.49%	Rp 1,988,428,652.50	BKPSDM	KAPUAS HULU
Meningkatnya Disiplin ASN	Persentase disiplin ASN					99.90%	99.90%	Rp 841,240,000.00	99.80%	Rp 841,240,000.00	99.80%	Rp 841,240,000.00	99.80%	Rp 841,240,000.00	99.80%	Rp 841,240,000.00	99.80%	Rp 841,240,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
Meningkatnya Kapasitas kinerja ASN	Persentase Kinerja ASN					83.33%	71.70%	Rp 2,513,187,550.00	80.00%	Rp 2,550,262,005.00	81.00%	Rp 2,591,043,905.50	82.00%	Rp 1,835,903,996.05	83.00%	Rp 2,685,250,095.66	83.00%	Rp 2,685,250,095.66	BKPSDM	KAPUAS HULU
Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat					91.07	92.20	Rp 3,496,317,150.00	92.50	Rp 3,740,169,475.00	93	Rp 3,731,770,841.00	94	Rp 3,739,302,009.00	95	Rp 3,773,978,955.00	95	Rp 3,773,978,955.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi					93.32%	93.33%	Rp 8,138,474,300.00	93.34%	Rp 5,357,494,200.00	93.35%	Rp 6,233,761,750.00	93.36%	Rp 5,378,870,375.00	93.37%	Rp 5,402,384,167.50	93.37%	Rp 5,402,384,167.50	BKPSDM	KAPUAS HULU

RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2022-
2026

			5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	123 SK	5	Rp 1,354,093,000.00	5	Rp 1,387,945,325.00	5	Rp 1,353,246,691.00	5	Rp 1,387,077,859.00	5	Rp 1,421,754,805.00	5	Rp 1,421,754,805.00	Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai	KAPUAS HULU			
			5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		1 Laporan	Rp 32,600,000.00	1 Laporan	Rp 32,600,000.00	1 Laporan	Rp 32,600,000.00	1 Laporan	Rp 32,600,000.00	1 Laporan	Rp 32,600,000.00	1 Laporan	Rp 32,600,000.00	Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai	KAPUAS HULU			
			5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 558,575,000.00	12 Dokumen	Rp 558,575,000.00	12 Dokumen	Rp 558,575,000.00	12 Dokumen	Rp 558,575,000.00	12 Dokumen	Rp 558,575,000.00	12 Dokumen	Rp 558,575,000.00	Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	KAPUAS HULU			
			5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	100% 4000 Data	100% 4500 Data	Rp 575,267,000.00	100% 4500 Data	Rp 575,267,000.00	100% 4500 Data	Rp 575,267,000.00	100% 4500 Data	Rp 575,267,000.00	100% 4500 Data	Rp 575,267,000.00	100% 4500 Data	Rp 575,267,000.00	100% 4500 Data	Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	KAPUAS HULU		
			5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Mutasi Pemindahan ASN yang terfasilitasi	53,48%	100%	Rp 231,946,000.00	100%	Rp 255,140,600.00	100%	Rp 231,946,000.00	100%	Rp 255,140,600.00	100%	Rp 231,946,000.00	100%	Rp 231,946,000.00	100%	Rp 231,946,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU	
					Persentase Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat, KGB dan Cuti ASN yang terfasilitasi	89,47%	100%	Rp 454,100,000.00	100%	Rp 431,395,000.00	100%	Rp 474,534,500.00	100%	Rp 450,807,775.00	100%	Rp 495,888,552.50	100%	Rp 495,888,552.50	100%	Rp 495,888,552.50	BKPSDM	KAPUAS HULU	
					Persentase jumlah PNS yang menduduki jabatan	139,13%	100%	Rp 1,366,603,000.00	100%	Rp 1,366,603,000.00	100%	Rp 1,366,603,000.00	100%	Rp 566,603,000.00	100%	Rp 1,366,603,000.00	100%	Rp 1,366,603,000.00	100%	Rp 1,366,603,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU	
			5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	251 PNS	8 Dokumen	Rp 231,946,000.00	8 Dokumen	Rp 255,140,600.00	8 Dokumen	Rp 231,946,000.00	8 Dokumen	Rp 255,140,600.00	8 Dokumen	Rp 231,946,000.00	8 Dokumen	Rp 231,946,000.00	8 Dokumen	Rp 231,946,000.00	Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai	KAPUAS HULU	
			5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat dan KGB ASN yang terselesaikan Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Jumlah SK Laporan Peningkatan Pendidikan dan Penyesuaian Masa Kerja ASN yang terselesaikan Buku Penjualan Cuti ASN Terlaksananya Sosialisasi tentang Peraturan Kenaikan Pangkat, KGB dan Cuti ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	961 SK	11 Dokumen	Rp 454,100,000.00	10 Dokumen	Rp 431,395,000.00	11 Dokumen	Rp 474,534,500.00	11 Dokumen	Rp 450,807,775.00	11 Dokumen	Rp 495,888,552.50	11 Dokumen	Rp 495,888,552.50	11 Dokumen	Rp 495,888,552.50	Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai	KAPUAS HULU
			5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 1,366,603,000.00	4 Dokumen	Rp 1,366,603,000.00	4 Dokumen	Rp 1,366,603,000.00	4 Dokumen	Rp 566,603,000.00	4 Dokumen	Rp 1,366,603,000.00	4 Dokumen	Rp 1,366,603,000.00	4 Dokumen	Rp 1,366,603,000.00	Bidang Pengembangan SDM Aparatur	KAPUAS HULU	

RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2022-
2026

			5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase PNS yang merekomendasi untuk pengembangan karier dan kompetensi	100%	100%	Rp 695,840,000.00	100%	Rp 695,840,000.00	100%	Rp 695,840,000.00	100%	Rp 695,840,000.00	100%	Rp 695,840,000.00	100%	Rp 695,840,000.00	BKPSDM	
					Persentase PNS yang memenuhi Standar Kompetensi Pendidikan	100%	100%	Rp 315,497,150.00	100%	Rp 525,497,150.00	100%	Rp 525,497,150.00	100%	Rp 525,497,150.00	100%	Rp 525,497,150.00	100%	Rp 525,497,150.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
					Persentase Pengembangan Karier Jabatan Fungsional	100%	100%	Rp 150,000,000.00	100%	Rp 150,000,000.00	100%	Rp 150,000,000.00	100%	Rp 150,000,000.00	100%	Rp 150,000,000.00	100%	Rp 150,000,000.00	BKPSDM	
			5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah JPT yang terasement	9	9		3		13		9		3		3		Bidang Pengembangan SDM Aparatur	KAPUAS HULU
					Jumlah Jabatan Administrasi yang terasement	7	54	Rp 371,840,000.00	60	Rp 371,840,000.00	50	Rp 371,840,000.00	54	Rp 371,840,000.00	60	Rp 371,840,000.00	60	Rp 371,840,000.00		
			5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		2 Dokumen	Rp 324,000,000.00	2 Dokumen	Rp 324,000,000.00	2 Dokumen	Rp 324,000,000.00	2 Dokumen	Rp 324,000,000.00	2 Dokumen	Rp 324,000,000.00	2 Dokumen	Rp 324,000,000.00	Bidang Pengembangan SDM Aparatur	KAPUAS HULU
			5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	3 orang	5 Orang		7 orang		7 orang		7 orang		7 orang		7 orang		Bidang Pengembangan SDM Aparatur	KAPUAS HULU
							3 orang	Rp 315,497,150.00	3 orang	Rp 525,497,150.00	3 orang	Rp 525,497,150.00	3 orang	Rp 525,497,150.00	3 orang	Rp 525,497,150.00	3 orang	Rp 525,497,150.00		
							30 orang		32 orang		35 orang		37 orang		38 orang		40 orang			
			5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah terfasilitasi pengembangan Karier Jabatan Fungsional		20		20		20		20		20		20		Bidang Pengembangan SDM Aparatur	KAPUAS HULU
					Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional		55	Rp 150,000,000.00	55	Rp 150,000,000.00	55	Rp 150,000,000.00	55	Rp 150,000,000.00	55	Rp 150,000,000.00	55	Rp 150,000,000.00		
			5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase PNS yang menyampaikan SKP tepat waktu dan sesuai ketetapan	96,31%	100%	Rp 450,744,550.00	100%	Rp 407,819,005.00	100%	Rp 448,600,905.50	100%	Rp 493,460,996.05	100%	Rp 542,807,095.66	100%	Rp 542,807,095.66	BKPSDM	KAPUAS HULU
					Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa ASN yang Terfasilitasi	100%	100%	Rp 510,285,000.00	100%	Rp 510,285,000.00	100%	Rp 510,285,000.00	100%	Rp 510,285,000.00	100%	Rp 510,285,000.00	100%	Rp 510,285,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
					Persentase Disiplin ASN	100%	100%	Rp 841,240,000.00	100%	Rp 841,240,000.00	100%	Rp 841,240,000.00	100%	Rp 841,240,000.00	100%	Rp 841,240,000.00	100%	Rp 841,240,000.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 Dokumen	Rp 30,000,000.00	1 Dokumen	Rp 30,000,000.00	1 Dokumen	Rp 30,000,000.00	1 Dokumen	Rp 30,000,000.00	1 Dokumen	Rp 30,000,000.00	1 Dokumen	Rp 30,000,000.00	Bidang Pengembangan SDM Aparatur	KAPUAS HULU
			5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 Laporan	Rp 50,000,000.00	1 Laporan	Rp 50,000,000.00	1 Laporan	Rp 50,000,000.00	1 Laporan	Rp 50,000,000.00	1 Laporan	Rp 50,000,000.00	4	Rp 50,000,000.00	Bidang Pengembangan SDM Aparatur	KAPUAS HULU
			5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	Rp 370,744,550.00	1 Laporan	Rp 407,819,005.00	1 Laporan	Rp 448,600,905.50	1 Laporan	Rp 493,460,996.05	1 Laporan	Rp 542,807,095.66	1 Laporan	Rp 542,807,095.66	Bidang Pengembangan SDM Aparatur	KAPUAS HULU
			5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Laporan Administrasi TPP bagi ASN yang difasilitasi	Laporan	12 Laporan	Rp 111,761,500.00	12 Laporan	Rp 111,761,500.00	12 Laporan	Rp 111,761,500.00	12 Laporan	Rp 111,761,500.00	12 Laporan	Rp 111,761,500.00	12 Laporan	Rp 111,761,500.00	Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	KAPUAS HULU
						100%			100%		100%		100%		100%		100%			

RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2022-
2026

			5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai yang difasilitasi	350 Usulan	Rp 398,523,500.00	350 Usulan	Rp 398,523,500.00	350 Usulan	Rp 398,523,500.00	350 Usulan	Rp 398,523,500.00	350 Usulan	Rp 398,523,500.00	350 Usulan	Rp 398,523,500.00	Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	KAPUAS HULU
			5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	6 Orang	6 Orang	Rp 256,704,500.00	6 Orang	Rp 256,704,500.00	6 Orang	Rp 256,704,500.00	6 Orang	Rp 256,704,500.00	6 Orang	Rp 256,704,500.00	Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	KAPUAS HULU
			5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 495,695,500.00	12 Laporan	Rp 495,695,500.00	12 Laporan	Rp 495,695,500.00	12 Laporan	Rp 495,695,500.00	12 Laporan	Rp 495,695,500.00	Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	KAPUAS HULU
			5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani		2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 30,959,000.00	2 Dokumen	Rp 30,959,000.00	2 Dokumen	Rp 30,959,000.00	2 Dokumen	Rp 30,959,000.00	2 Dokumen	Rp 30,959,000.00	Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	KAPUAS HULU
			5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN		4 Laporan	4 Laporan	Rp 57,881,000.00	4 Laporan	Rp 57,881,000.00	4 Laporan	Rp 57,881,000.00	4 Laporan	Rp 57,881,000.00	4 Laporan	Rp 57,881,000.00	Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	KAPUAS HULU
			5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang terpenuhi pengembangan kompetensi Teknis				Rp 501,009,400.00		Rp 543,761,750.00		Rp 543,761,750.00		Rp 565,137,925.00		Rp 588,651,717.50	BKPSDM	KAPUAS HULU
					Persentase PNS yang terpenuhi pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional				Rp 7,637,464,900.00		Rp 4,813,732,450.00		Rp 5,690,000,000.00		Rp 4,813,732,450.00		Rp 4,813,732,450.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen PNS yang terpenuhi pengembangan Kompetensi Teknis	100%	100%	100%	Rp 501,009,400.00	100%	Rp 543,761,750.00	100%	Rp 543,761,750.00	100%	Rp 565,137,925.00	100%	Rp 588,651,717.50	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Peraturan Bupati	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 50,000,000.00	1 Dokumen	Rp 50,000,000.00	1 Dokumen	Rp 50,000,000.00	1 Dokumen	Rp 50,000,000.00	1 Dokumen	Rp 50,000,000.00	Bidang Pengembangan SDM Aparatur	KAPUAS HULU
			5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	-	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 180,000,000.00	1 Dokumen	Rp 180,000,000.00	1 Dokumen	Rp 180,000,000.00	1 Dokumen	Rp 180,000,000.00	1 Dokumen	Rp 180,000,000.00	Bidang Pengembangan SDM Aparatur	KAPUAS HULU

RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2022-
2026

			5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	9 orang	40 Orang	Rp 171,009,400.00	50 Orang	Rp 213,761,750.00	50 Orang	Rp 213,761,750.00	15 Orang	Rp 235,137,925.00	20 Orang	Rp 258,651,717.50	20 Orang	Rp 258,651,717.50	Bidang Pengembangan SDM Aparatur	KAPUAS HULU
			5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	-	9 Dokumen	Rp 100,000,000.00	13 Dokumen	Rp 100,000,000.00	13 Dokumen	Rp 100,000,000.00	13 Dokumen	Rp 100,000,000.00	13 Dokumen	Rp 100,000,000.00	13 Dokumen	Rp 100,000,000.00	Bidang Pengembangan SDM Aparatur	KAPUAS HULU
			5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			100%	Rp 7,637,464,900.00	100%	Rp 4,813,732,450.00	100%	Rp 5,690,000,000.00	100%	Rp 4,813,732,450.00	100%	Rp 4,813,732,450.00	100%	Rp 4,813,732,450.00	BKPSDM	KAPUAS HULU
			5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional yang Disusun	-	1 Dokumen	Rp 50,000,000.00	1 Dokumen	Rp 50,000,000.00	1 Dokumen	Rp 50,000,000.00	1 Dokumen	Rp 50,000,000.00	1 Dokumen	Rp 50,000,000.00	1 Dokumen	Rp 50,000,000.00	Bidang Pengembangan SDM Aparatur	KAPUAS HULU
			5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	-	5 Orang	Rp 35,000,000.00	5 Orang	Rp 35,000,000.00	5 Orang	Rp 35,000,000.00	5 Orang	Rp 35,000,000.00	5 Orang	Rp 35,000,000.00	5 Orang	Rp 35,000,000.00	Bidang Pengembangan SDM Aparatur	KAPUAS HULU
			5.04.02.2.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	-	1 Laporan	Rp 25,000,000.00	1 Laporan	Rp 25,000,000.00	1 Laporan	Rp 25,000,000.00	1 Laporan	Rp 25,000,000.00	1 Laporan	Rp 25,000,000.00	1 Laporan	Rp 25,000,000.00	Bidang Pengembangan SDM Aparatur	KAPUAS HULU
			5.04.02.2.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	-	1 Dokumen	Rp 150,000,000.00	1 Dokumen	Rp 150,000,000.00	1 Dokumen	Rp 150,000,000.00	1 Dokumen	Rp 150,000,000.00	1 Dokumen	Rp 150,000,000.00	1 Dokumen	Rp 150,000,000.00	Bidang Pengembangan SDM Aparatur	KAPUAS HULU
			5.04.02.2.02.06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	-	1 Dokumen	Rp 180,000,000.00	1 Dokumen	Rp 180,000,000.00	1 Dokumen	Rp 180,000,000.00	1 Dokumen	Rp 180,000,000.00	1 Dokumen	Rp 180,000,000.00	1 Dokumen	Rp 180,000,000.00	Bidang Pengembangan SDM Aparatur	KAPUAS HULU
			5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, kepemimpinan, dan Prajabatan		4 Laporan	6,847,464,900	4 Laporan	3,923,732,450	4 Laporan	4,800,000,000	4 Laporan	3,923,732,450	4 Laporan	3,923,732,450	4 Laporan	3,923,732,450	Bidang Pengembangan SDM Aparatur	KAPUAS HULU

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, terlebih pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap berlandaskan pada tinjauan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati beserta turunannya.

Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2025 merupakan misi, tujuan dan sasaran sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1.1

Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Predikat SAKIP BKPSDM		A	A	A	A	AA	AA
2	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi Pendidikan	46,44 %	46,45 %	46,46%	46,47%	46,48%	46,49%	46,49%
3	Persentase Disiplin ASN	99,90%	99,90%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%
4	Persentase Kapasitas kinerja ASN	83,33 %	71,70%	80,00%	81,00%	82,00%	83,00%	83,00%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,07	92,20	92,50	93	94	95	95
6	Persentase ASN yang memenuhi Standar Kompetensi	93,32%	93,33%	93,34%	93,35%	93,36%	93,37%	93,37%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar mampu senantiasa mengikuti setiap perubahan lingkungan, sehingga tetap eksis dalam mengelola seluruh sumberdaya yang dimiliki.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026, Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu sangat diperlukan sebagai sarana untuk mengimplementasikan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) sangat ditentukan oleh kesamaan tujuan, sasaran dan keterpaduan serta komunikasi dalam menciptakan sinergi antara upaya segenap jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis, sudah barang tentu Rencana Strategis (Renstra) ini tetap terbuka untuk langkah – langkah penyempurnaan dan penyesuaian, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masa mendatang.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu ini disusun sebagai bahan rujukan dalam pemantapan kebijakan dan perumusan program 5 tahun kedepan (2022-2026).